



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2022



Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran | (0623) 347-924

Email : bpbdkab.asahan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan semua data kinerja secara terbuka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna. Kami juga menerima saran dan kritik demi sempurnanya dalam Rencana Kerja ini, sehingga dapat mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Demikian **Laporan Kinerja (LKj)** Tahun 2022 ini diperbuat untuk dapat dimanfaatkan

Akhirnya, kepada Tuhan YME, kita berserah diri seraya berdo'a semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan mendapat izin dan RidhoNya. Amin , Terimakasih.

Kisaran, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. ASAHAN



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan kepada publik ataupun kepada pemberi mandat (dalam hal ini Bupati Asahan) pada prinsipnya merupakan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan beserta perangkatnya untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata – mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan serta fungsi pengawasan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Dalam **Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022** ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Bahwa, secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan yang diamanatkan oleh Bupati Asahan telah terselenggara sebagaimana mestinya;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan beserta seluruh pejabat dan staf bawahannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
3. Ukuran keberhasilan atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban yang disebutkan pada point (1) dan (2) dapat diperoleh dari data – data indikator kinerja;
4. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode tersebut dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan apa yang telah dicapai organisasi;

5. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan seluruhnya telah berhasil diwujudkan dengan baik. Namun belum sepenuhnya menunjukkan atau merepresentasikan keberhasilan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan yang sesungguhnya. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran yakni pada tingkat output sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat outcomes. Penyebabnya adalah organisasi belum maksimal dalam mendefinisikan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat;

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ASPEK STRATEGIS	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 10
A. RENCANA STRATEGIS	10
a). Visi	11
b). Misi	12
c). Tujuan	12
d). Sasaran	13
e). Strategi dan Kebijakan	13
f). Program	16
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN	17
C. PENETAPAN KINERJA	19
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 20
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022	22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	24
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
 BAB IV : PENUTUP	 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LKj).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan menyusun Laporan Kinerja (LKj) 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja (LKj) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yaitu : Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah melalui bidang penanggulangan bencana daerah yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana di Daerah Kabupaten Asahan. Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efisien dan efektif.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kabupaten, sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, sedangkan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Subbag, 6 (enam) Subbid, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

C. ASPEK STRATEGIS.

Aspek Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penanggulangan serta pengurangan resiko bencana di desa dan kecamatan, optimalisasi instrumen pengendalian mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Strategi pengurangan resiko bencana yaitu :

1. Pencegahan dan Mitigasi :

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu mitigasi pasif (kontiniu) dan mitigasi aktif (struktur).

- ❖ Tindakan Pencegahan yang yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
 - c. Pembuatan pedoman/standar/prosedur.
 - d. Pembuatan brosur/leaflet/poster.
 - e. Penelitian/pengkajian karakteristik bencana.
 - f. Pengkajian/analisis resiko bencana.
 - g. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan.
 - h. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana.
 - i. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
 - j. Pengarus utamaan PB dalam perencanaan pembangunan.

- ❖ Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi aktif antara lain :
 - a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
 - c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
 - d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
 - e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
 - f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
 - g. Pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti : tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

2. Kesiapsiagaan.

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengaktifkan pos-pos siaga bencana dan kebakaran dengan segenap unsur pendukungnya.
- b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)
- c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan.
- d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
- e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
- f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)
- g. Penyusunan rencana kontijensi (contingency plan)
- h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

3. Tanggap Darurat.

Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :

- a. Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

4. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d. Pemulihan sosial psikologis
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik

sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait :

- a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana
- b. Pembangunan kembali sarana dan sosial masyarakat
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

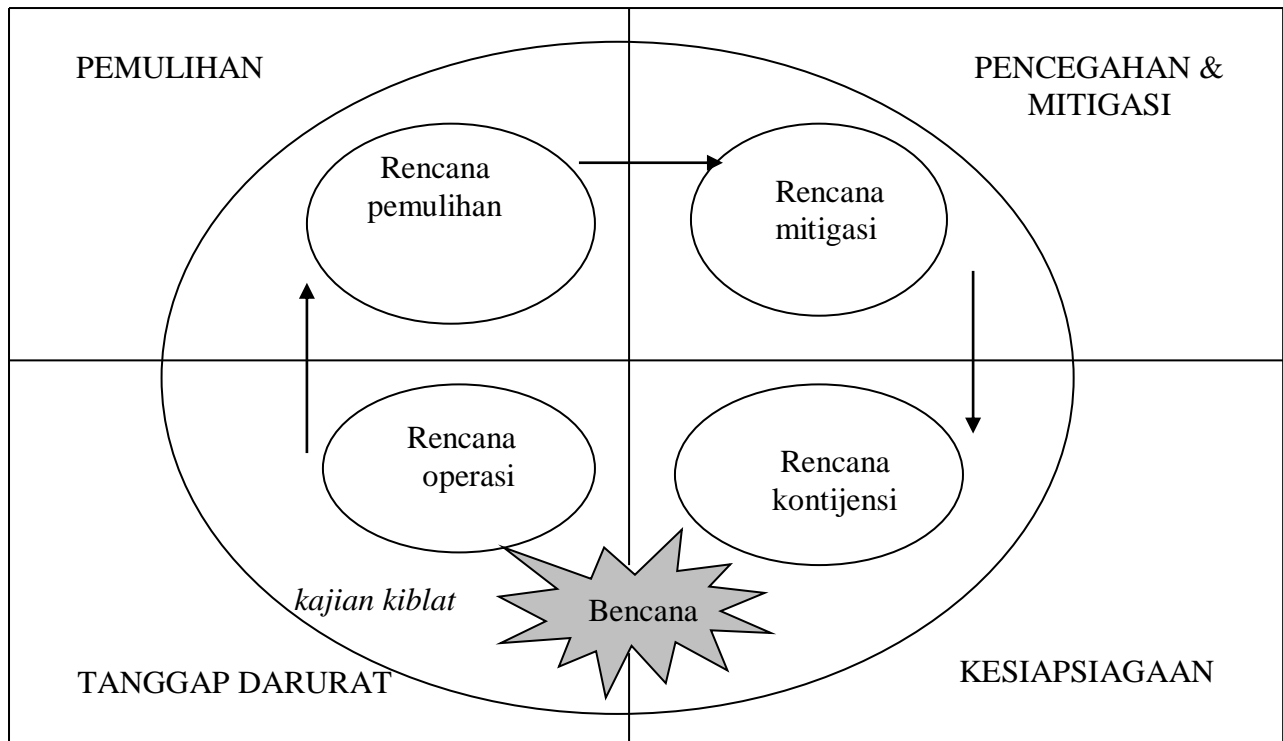


Diagram : Siklus Penanggulangan Bencana

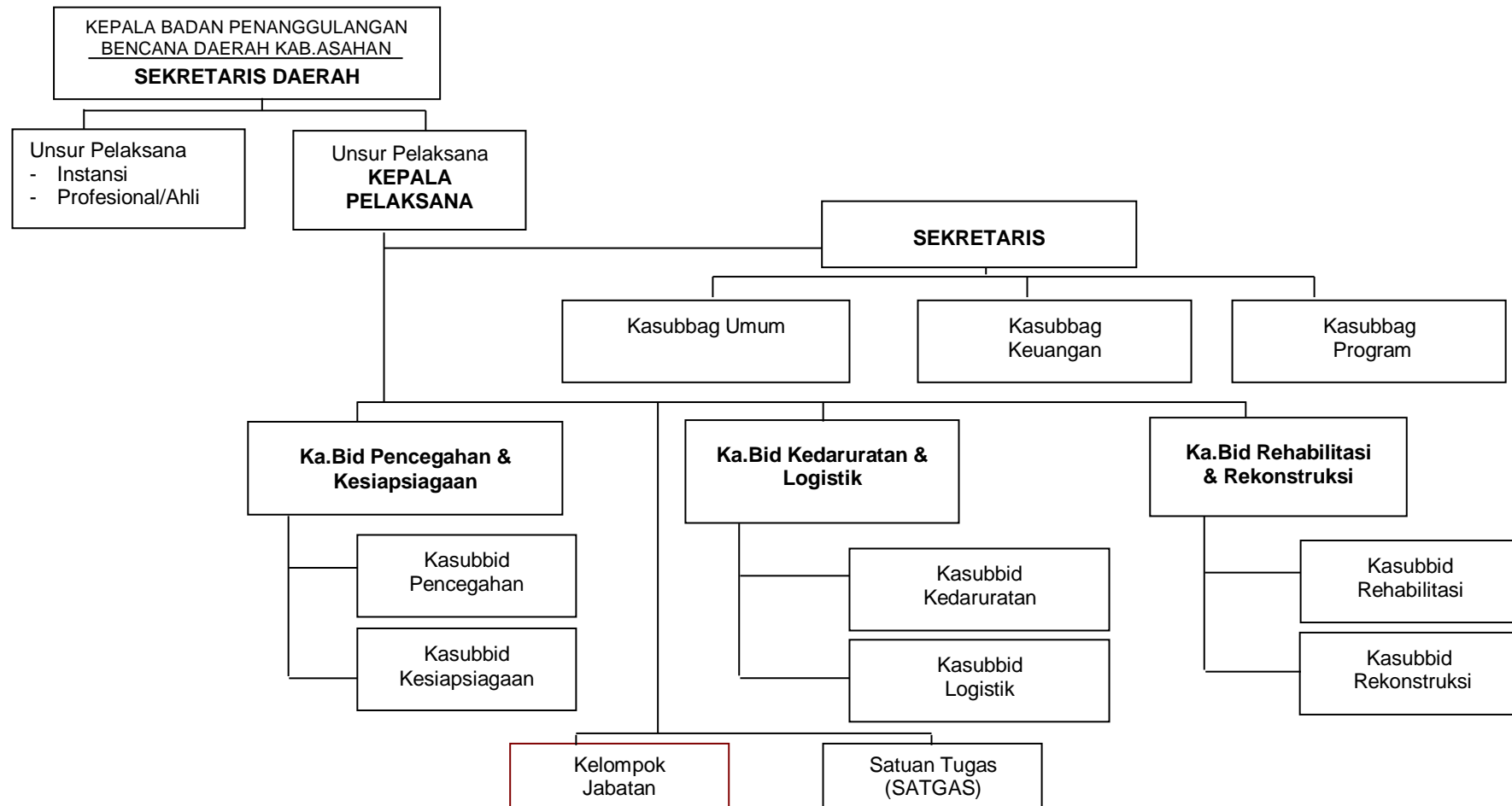
D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 6 Tahun 2011 tanggal 16 maret 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Asahan dibidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut disampaikan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 6 Tahun 2011 sebagai berikut :

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 MARET 2011
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN ASAHAN

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.ASAHAN



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Adapun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu :

VISI :

“Masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter”

- MISI :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;
 2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
 4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
 5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan apbd yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
 7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
 8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia;

Mengacu kepada Visi Bupati Asahan “*Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter*” dengan Misi Pertama “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel*”, Untuk menunjang Visi dan Misi Bupati Asahan “*Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter*” Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan mempunyai Visi sebagai berikut :

a. Visi :

“Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tangguh, Mitigatif, dan Koordinatif”.

Dari pemahaman makna yang terkandung dalam visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tangguh : Dapat menanggulangi bencana secara cepat, tepat, dan manusiawi
- b. Mitigatif : Dapat mengurangi risiko terjadinya bencana
- c. Koordinatif : Dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga lain dalam menanggulangi bencana.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan

dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi *“Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tangguh, Mitigatif, dan Koordinatif”* secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi bencana pada saat maupun setelahnya.

b. Misi

Untuk itu misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan yaitu:

- a) Mendekatkan jarak pelayanan penanggulangan bencana ke lingkungan masyarakat
- b) Meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi bencana
- c) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
- e) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana
- f) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari Tahun 2021 s/d 2026. Setelah diteliti ulang dari hasil-hasil analisa strategis dan identifikasi isu-isu strategis, maka di dapatkan langkah-langkah yang akan dituju dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan, antara lain :

1. Terselenggaranya penanganan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta transparan.
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Terpenuhinya pelayanan masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana yang cepat, tepat dan aman.
4. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik dengan terpadu dan menyeluruh.

d. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Organisasi dan di rumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat diukur dalam pencapaian. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, berikut pada table dibawah ini :

Table
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Tingkat penanganan penanggulangan bencana	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100
		Persentase desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam system manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100

e. Strategi dan Kebijakan

e.1. Strategi.

Strategi yang perlu dilakukan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ingin dicapai ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi guna menunjang keberhasilan tujuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan dapat diidentifikasi

melalui pendekatan Analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Guna mendukung lancarnya tugas serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan, maka perlu dimuat Tatalaksana hal-hal terkait dengan proses prosedur, mekanisme, Proses perencanaan faktor internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) dapat diuraikan dalam table.

Faktor Internal.

Faktor Internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) dapat diuraikan dalam table.

Table
Faktor-faktor Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	1. Kurangnya sosialisasi, koordinasi dan informasi mengenai peraturan - peraturan dan perundang-undangan.
2. Tersedianya sumberdaya manusia dan dukungan komitmen dari pimpinan.	2. Kurangnya tenaga, pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang kompeten.
3. Kebijakan Pusat dan Daerah yang serasi.	3. Minimnya koordinasi dari Tingkat Daerah ke Pusat dan sebaliknya.
4. Tersedianya Anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana.	4. Minimnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana.

e.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi yang diinginkan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dan Analisa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

Kebijakan Internal.

- a. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman Aparatur akan penanganan bencana.
- b. Meningkatkan prakarsa peran aktif masyarakat, termasuk kalangan masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial / LSM dalam penyelenggaraan penanganan bencana.

Kebijakan Eksternal.

- a. Mengajak semua stakeholder untuk aktif berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- b. Pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bencana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan, maka dapat dijabarkan kondisi umum sesuai tugas dan fungsi utamanya adalah :

Indikator Kinerja	Hasil Capaian Kinerja
1	2
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.	1. Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.
2. Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.	2. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana.
3. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas.	3. Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
4. Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana.	4. Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana.

1	2
5. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).	5. Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
6. Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya.	6. Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana.
7. SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat.	7. Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam.
8. Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.	8. Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman.
9. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	9. Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

f. Program

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA.

Kegiatan :

- 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
- 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Efesien, yaitu untuk meningkatkan Sistem pengelolaan dan kapasitas sumberdaya manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan. Selanjutnya kami merencanakan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam Rencana Strategis serta Rencana Kerja Tahunan, sedangkan pada Tahun 2022 Program Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada table berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Indeks Risiko Bencana (IRB).	166,98
		Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	100 %
		Persentase desa tangguh bencana.	20,38 %
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100 %
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	2,83 %

C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan mempunyai rencana kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Maka Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam mencapai tujuan pada setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan disamping itu juga menjadi indikator dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan target yang telah direncanakan, berikut ini Program dan kegiatan yang menjadi indikator utama dalam mencapai sasaran dan tujuan utama,

Penetapan Kinerja mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan tujuan dan sasaran Strategis organisasi yang merupakan dokumen perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Terlampir). Disamping itu terlampir juga Indikator kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Indeks Risiko Bencana (IRB).	Skor	166,98
		Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	Persen	100%
		Persentase desa tangguh bencana.	Persen	20,38
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Persen	100%
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	Persen	2,83

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.196.989.974,00	P. APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.615.846.431,00	P. APBD

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100	1. Bidang Kedaruratan dan Logistik 2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Bidang Kedaruratan dan Logistik 2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Persentase desa tangguh bencana.	Jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022.

Pengukuran capaian Kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dengan realisasi.
2. Membandingkan tahun ini dengan tahun lalu.
3. Membandingkan dengan organisasi lain.
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya.

Beberapa tahapan pengukurannya :

1. Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran kinerja.
2. Dalam Analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efesiensi, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja antara lain mencakup analisis input output, analisis realisasi outcomes benefits, analisis impact baik positif maupun negatif dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut, analisis keuangan dan kebijakan.

Perumusan indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja makro Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut :

No.	Target Indikator Kinerja	Kategori
1.	85 – 100	Sangat Berhasil
2.	70 – 84	Berhasil
3.	55 – 69	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 55	Kurang Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan ini di dasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Sasaran		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	166,98	167,20	Kelas Risiko Tinggi
		Tingkat penanganan penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %
		Persentase desa tangguh bencana	20,38 %	21,45 %	105,25 %
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	2,83 %	4,58 %	161,84

Hasil Capaian kinerja meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja terdiri dari 4 (empat) indikator kategori Baik, dengan demikian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tahun 2022 kategori Sangat Berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dengan realisasi pencapaiannya.

Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan terget dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah pada table dibawah ini :

Table.1
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Tangguh, Mitigatif dan Koordinatif

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Pencapaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Pencapaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor	166,99	167,20	Tinggi	166,98	167,20	Tinggi
Tingkat penanganan penanggulangan bencana	Persen	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
Persentase desa tangguh bencana	Persen	16,13 %	-	100	20,38 %	21,45 %	105,25 %
Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	-	-	-	2,83 %	4,58 %	161,84 %

Analisis dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indeks risiko bencana (IRB) dengan **kelas risiko masih tinggi**, sedangkan tingkat penanganan penanggulangan bencana **100%**, persentase desa tangguh bencana **105,25%**, persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana **100%** serta tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana **161,84%**.

Dari keberhasilan tersebut, tentang penanganan kejadian bencana yang dilapangan dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi korban yang terdampak dapat terlayani keseluruhannya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	166,98	167,20	-
		Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	100 %	100 %	100 %
		Persentase desa tangguh bencana.	20,38 %	21,45 %	105,25 %
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100 %	100 %	100 %
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	2,83 %	4,58	161,84

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Akuntabilitas Keuangan Untuk Anggaran Belanja Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 5.812.836.405,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.550.009.286,00** atau sebesar **95,48 %** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.989.974,00	4.011.984.806,00	185.005.168,00	95,59
2.	Program Penanggulangan Bencana	1.615.846.431,00	1.538.024.480,00	77.821.951,00	95,18
Jumlah		5.812.836.405,00	5.550.009.286,00	262.827.119,00	95,48

Daftar Program dan Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan TA. 2022, terlampir

REALISASI KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
						ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,812,836,405.00	5,550,009,286.00	95.48
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah				I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,196,989,974.00	4,011,984,806.00	95.59
				<i>Kegiatan :</i>			
				1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,771,725.00	95,475,278.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	6	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,101,825.00	27,060,303.00	99.85
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68,669,900.00	68,414,975.00	99.63
				<i>Kegiatan :</i>			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,803,358,757.00	2,643,078,997.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	20	20	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,755,879,707.00	2,595,853,197.00	94.19
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1	1	2) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,303,675.00	4,285,000.00	99.57
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	18	18	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	43,175,375.00	42,940,800.00	99.46
				<i>Kegiatan :</i>			
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	383,370,086.00	382,033,981.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46,392,100.00	46,386,280.00	99.99
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,306,350.00	89,270,750.00	99.96

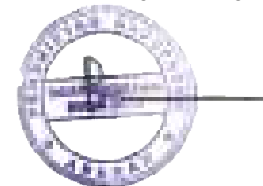
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,299,736.00	23,279,943.00	99.92
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,125,000.00	34,125,000.00	100.00
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,328,900.00	57,311,025.00	99.97
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	6) Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,164,000.00	10,070,000.00	99.08
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,754,000.00	121,590,983.00	99.05
				<i>Kegiatan :</i>			
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236,277,800.00	235,165,000.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	1) Pengadaan Mebel	20,825,000.00	20,645,000.00	99.14
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,442,800.00	114,392,000.00	99.96
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101,010,000.00	100,128,000.00	99.13
				<i>Kegiatan :</i>			
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,443,356.00	172,564,567.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	80,209,596.00	74,622,551.00	93.03
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,733,760.00	93,442,016.00	95.61
				<i>Kegiatan :</i>			
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,768,250.00	483,666,983.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	18	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346,644,500.00	334,760,633.00	96.57

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111,293,750.00	111,076,350.00	99.80
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37,830,000.00	37,830,000.00	100.00
Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum				II. Program Penanggulangan Bencana	1,615,846,431.00	1,538,024,480.00	95.18
				<i>Kegiatan :</i>			
				1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	219,157,330.00	218,679,694.00	
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	450	450	1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	219,157,330.00	218,679,694.00	99.78
				<i>Kegiatan :</i>			
				2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	417,481,951.00	411,293,037.00	98.52
				<i>Sub Kegiatan :</i>			
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100	100	1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	59,447,300.00	56,178,700.00	94.50
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	2	2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	49,306,226.00	49,260,000.00	99.91
	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1	1	3) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	27,874,250.00	27,085,050.00	97.17
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	1	4) Penanganan Pasca Benca Kabupaten/Kota	227,332,175.00	225,580,175.00	99.23
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	50	5) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	53,522,000.00	53,189,112.00	99.38
				<i>Kegiatan :</i>			
				3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	979,207,150.00	908,051,749.00	92.73

	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	1	<i>Sub Kegiatan :</i> 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	492,195,900.00	487,041,389.00	98.95
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	37491	27502	2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	143,242,250.00	143,068,100.00	99.88
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	415	3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	343,769,000.00	277,942,260.00	80.85

Kisaran, Januari 2023.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004

BAB IV

P E N U T U P

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik terhadap sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 1 (satu) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator Sasaran, diketahui bahwa semua Indikator sasaran rata-rata baik, dengan demikian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tahun 2022 **Sangat Berhasil (Baik)**.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tahun 2022 ini akan digunakan sebagai alat untuk koreksi dan perbaikan kinerja dan manajemen dan juga sebagai sarana kontrol dan komunikasi pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan TA. 2022 ini dibuat semoga dapat bermanfaat.

Kisaran, Januari 2023

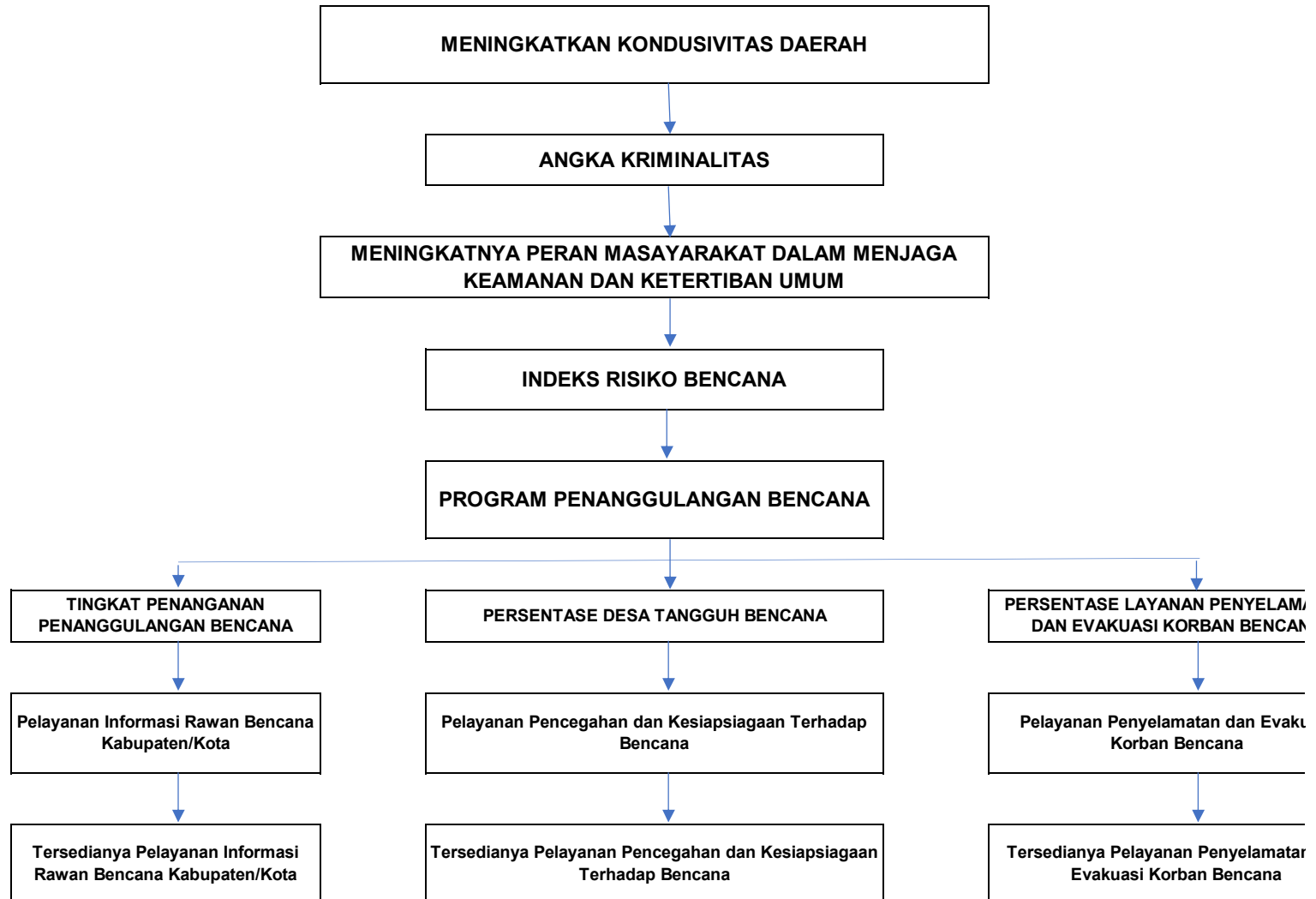
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. ASAHAN



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2022**



ATAN
JA

asi

dan

RENCANA AKSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET
			T W I	T W II	T W III	T W IV						T W I	T W II	T W III	T W IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
1	Meningkat nya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Tingkat Penanganan Penanggula- ngan Bencana Persentase Desa Tangguh Bencana Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tingkat Keterpaduan Sistem Dasar Penanggula- ngan Bencana	√	-	-	√	Program Penangula ngan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota. - Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana).	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.	450 Org	219.157.330,00	√	-	-	√	

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota. - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota. - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota.	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas. Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).	100 Org 2 Unit 1 Dok 1 Dok	59.447.300,00 49.306.226,00 27.874.250,00 227.332.175,00	-	-	-	√	
			-	-	-	√						-	-	-	√	
			-	√	-	-						-	√	-	-	
			-	-	-	√						-	-	-	√	
			√	√	√	√						√	√	√	√	

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
			-	-	-	√		- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota.	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya.	50 Org	53.522.000,00	-	-	-	√	
			√	√	√	√		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.								
								- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota.	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Doku men Laporan Kaji Cepat.	1 Dok	492,195.900,00	√	√	√	√	
			√	√	√	√		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.	37.491 Orang	143.242.250,00	√	√	√	√	
			√	√	√	√		- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	500 Orang/ Paket	343.769.000,00	√	√	√	√	



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARRY NALDO TAMBUNAN, SE.**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. S U R Y A, B.Sc**

Jabatan : Bupati Asahan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI ASAHAN.



H. S U R Y A, B.Sc.

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ASAHAN,



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	1 Indeks Risiko Bencana (IRB)	166.98
		2 Tingkat penanganan penanggulangan bencana	100%
		3 Persentase desa tangguh bencana	20.38%
		4 Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		5 Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	2.83%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,196,989,974.00	P.APBD
2 Program Penanggulangan Bencana	Rp 1,615,846,431.00	P.APBD

Kisaran, Oktober 2022.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004

BUPATI ASAHAN.



H. S U R Y A, B.Sc

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kondusifitas daerah.	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	BPBD
			Persentase desa tangguh bencana.	Jumlah desa tangguh bencana dibagi Jumlah desa rawan bencana dikali 100%	BPBD
			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi Jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100%	BPBD
			Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	BPBD

Kisaran, Oktober 2022.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



HARRY NALDO TAMBUNAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641224 199003 1 004.